

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini disampaikan terimakasih. Semoga harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Gresik, 12 Agustus 2025
CAMAT GRESIK

JALESVIE TRIYATMOKO, S.S.

Pembina

NIP. 19801217 200604 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	6
1.3 Maksud Dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	13
BAB II	57
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT.....	57
DAERAH.....	57
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	57
2.1.1 Sekretaris Kecamatan.....	58
2.1.2. Subbagian keuangan ,program dan pelaporan, mempunyai tugas;.....	59
2.1.3. Seksi Pemerintahan	59
2.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	61
2.1.5. Seksi Ekonomi	61
2.1.6. Seksi Pembangunan	62
2.1.7. Seksi Kesejahteraan Rakyat	63
2.1.8. Kelurahan	63
2.1.9. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.....	64
2.1.10. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gresik.....	65
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	67
BAB III	70
TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
<u>3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029</u>	<u>70</u>
3.1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Gresik 2025-2029.....	70
3.1.2. Sasaran Renstra Kecamatan Gresik.....	73
3.1.3. Indikator Sasaran.....	73
3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Gresik.....	75
Tahun 2025-2029	75
<u>3.3 Arah kebijakan Kecamatan Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra</u>	<u>77</u>
<u>PD Tahun 2025-2029.....</u>	<u>77</u>
3.1.1 Arah Pembangunan	77
3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan.....	77
BAB IV	80

PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	80
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	80
4.2. Program	80
4.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	80
4.2.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80
4.2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Desa.....	80
4.2.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	80
4.2.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan/Desa.....	80
4.3. Kegiatan	81
4.4. Sub Kegiatan	81
BAB V PENUTUP	135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Gresik merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Gresik disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Gresik berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra -

Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra* 2025-2029 yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Gresik. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Gresik, dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan sebagaimana diatur pada BAB VI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH bagian Kedua, pasal 89 ayat (2) Penyusunan RENSTRA SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
- b. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan
- d. Penetapan Renstra SKPD

Selanjutnya di paragraf 1 pada tahapan **Persiapan penyusunan** Renstra dan pasal 90, persiapan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra SKPD
- b. Orientasi mengenai Renstra SKPD
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra SKPD, dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra SKPD Kecamatan Gresik tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD. Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Gresik yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Gresik
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Gresik
- **Kelompok Kerja** :
 - Kasubbag Keuangan
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Kasi Ekonomi
 - Kasi Pembangunan

- Kasi Trantib
- Kasi Kesra
- Kasi Pemerintahan

▪ **Pembantu Pelaksana** : Para Staf Kecamatan Gresik

Terbentuknya Tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Gresik tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Gresik perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan sebagai berikut :

- Persamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

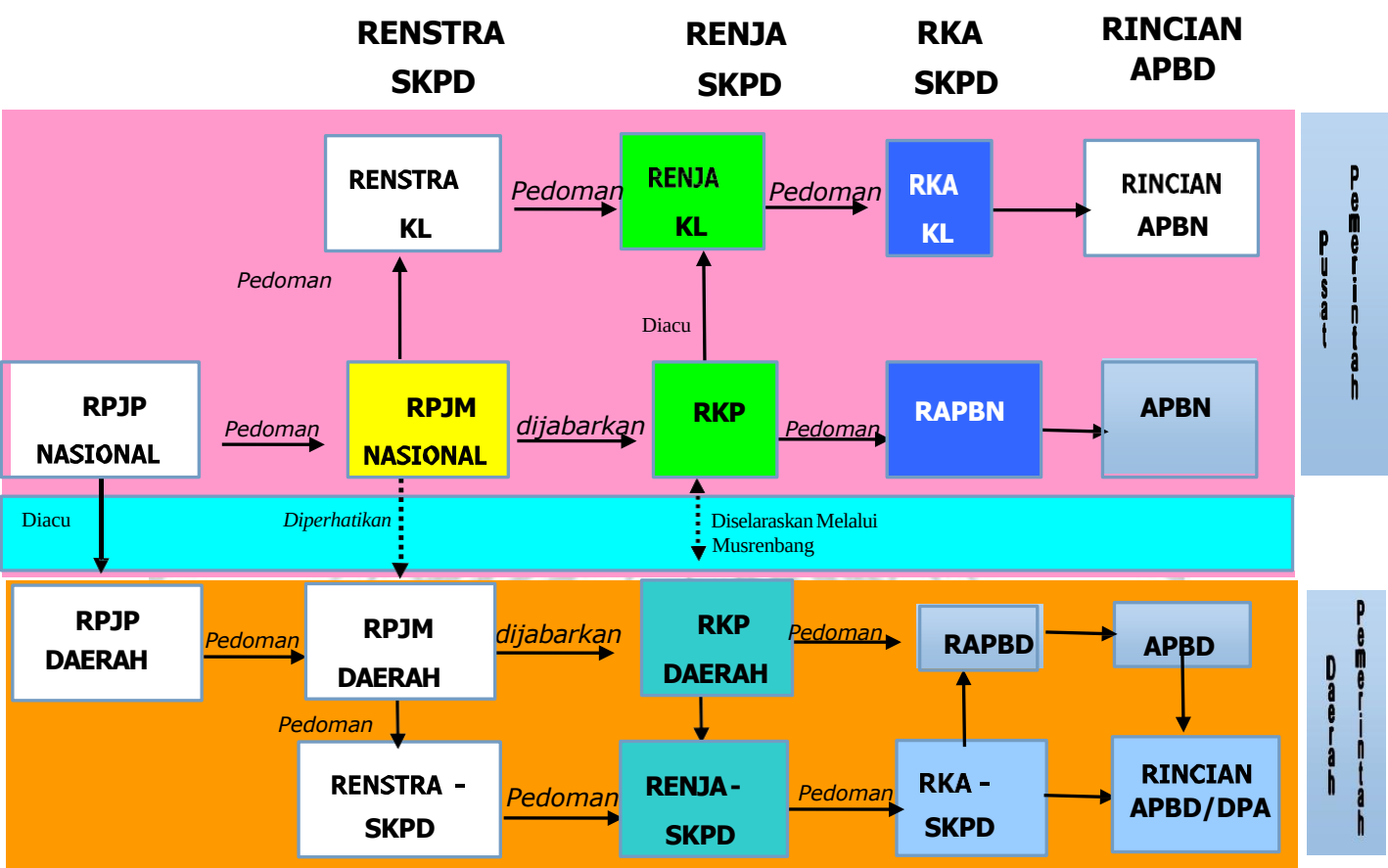
Dari awal tahapan hingga terwujudnya penetapan RENSTRA SKPD Kecamatan Gresik agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu / SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA SKPD dengan tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika dan moral di ranah publik dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan RENSTRA SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada Gambar. 1 berikut ini :

KETERKAITAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Gambar. 1. Diagram Keterkaitan RENSTRA SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025– 2029 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 40 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan lembaran Negara Reublik Indonesia No.4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undangan nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398)
 10. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republi indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679)
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 13. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 16. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5888)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6402

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan - Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6056)
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
22. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 225, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6133)
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)

27. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 80)
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4)
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
31. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
34. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
37. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045
53. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
54. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik
55. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Keamatan
56. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik
57. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 adalah untuk :

- (1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ke dalam rencana instansional;
- (2) Menjabarkan visi dan misi Bupati Gresik 2025 – 2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
- (3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan, dalam - rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Gresik ;
- (4) Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- (5) Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik selama periode tahun 2025-2029;
- (6) Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 Bab yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN,

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD,

Memberikan gambaran umum tentang pelayanan, Uraian isu-isu strategis

mengidentifikasi permasalahan strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, dan struktur organisasi SKPD, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gresik;

3. BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Terdiri atas :Uraian tujuan dan sasaran Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tujuan merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.

4. BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, penyelenggaraan bidang urusan dan pagu indikatif serta arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja untuk mencapai tujuan.

5. BAB V PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Program Transisi, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu ditambahkan rancangan program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode Renstra-SKPD berakhir untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD atau masa akhir jabatan Kepala Daerah. Kaidah Pelaksanaan meliputi penjelasan antara lain : (i) Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja SKPD, (ii) Perlunya penguatan peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renstra SKPD, (iii) Renstra SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan, dan (iv) Catatan dan harapan dari Kepala SKPD.

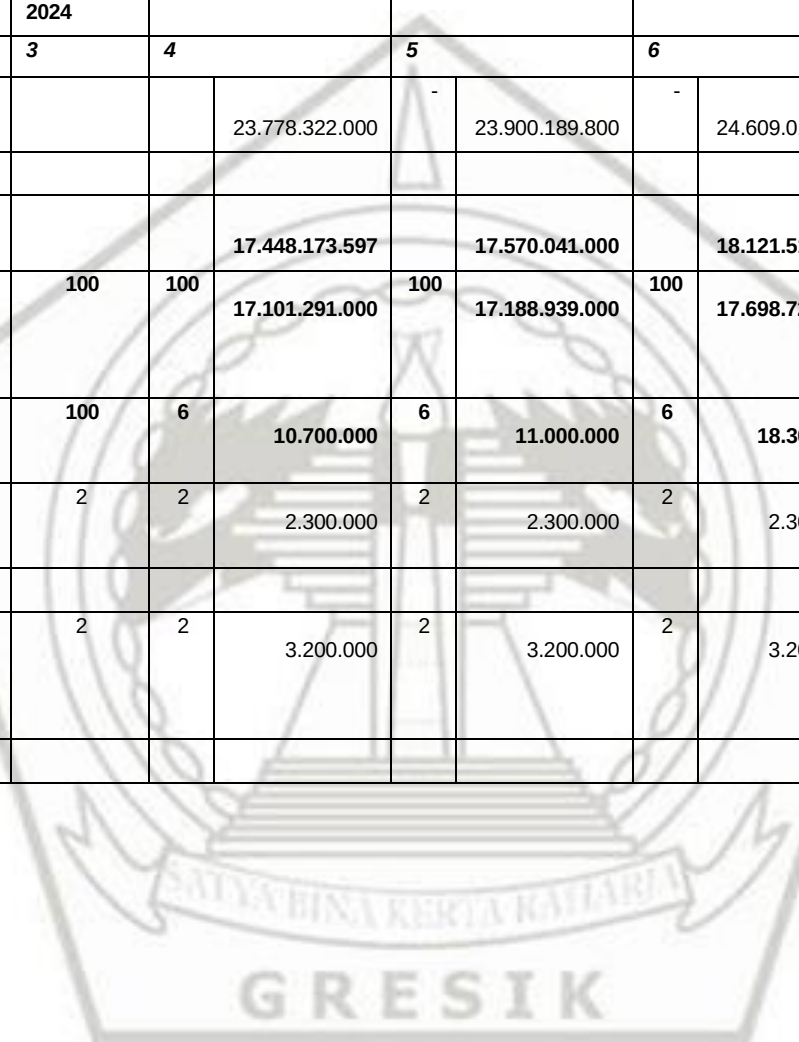
LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Matriks Renstra tahun 2025-2029 Kecamatan Gresik

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD												
KECAMATAN GRESIK												
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	90	91	92	93	94	95	
Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan Desa/kelurahan		100	100	100	100	100	100	
Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat										
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa		Indeks Ketimpangan Gender										
Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah		Rasio Government Expenditur										

Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah		Indeks Resiko Bencana										
Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif		Indeks Perlindungan Anak										

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
1	2	3	4		5		6		7		8		9	
KECAMATAN GRESIK				23.778.322.000	-	23.900.189.800	-	24.609.014.000	-	25.512.691.000	-	26.790.803.000		27.608.693.000
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN				17.448.173.597		17.570.041.000		18.121.514.000		18.801.191.000		19.767.303.000		20.361.193.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PENUNJANG URUSAN	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	100	17.101.291.000	100	17.188.939.000	100	17.698.723.000	100	18.348.644.000	100	19.267.858.000	100	19.856.082.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	6	10.700.000	6	11.000.000	6	18.300.000	6	24.200.000	6	18.300.000	6	18.300.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2.300.000	2	2.300.000	2	2.300.000	2	3.200.000	2	2.300.000	2	2.300.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	3.200.000	2	3.200.000	2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000



Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	3.200.000	2	3.200.000	2	4.100.000	2	5.500.000	2	4.100.000	2	4.100.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2.000.000	2	2.300.000	2	2.300.000	2	3.200.000	2	2.300.000	2	2.300.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	100	3	15.418.106.022	3	15.418.105.869	3	15.713.405.341	3	16.239.844.000	3	17.012.258.000	3	17.447.982.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130	130	15.414.006.022	130	15.414.005.869	130	15.706.105.341	130	16.230.244.000	130	17.004.958.000	130	17.440.682.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	4.100.000	2	4.100.000	2	4.100.000	2	5.500.000	2	4.100.000	2	4.100.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber daya Aparatur di Kecamatan	100	4	3.756.504	4	8.200.000	4	92.300.000	4	94.600.000	4	102.300.000	4	107.300.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21	21	3.756.504	21	4.100.000	21	4.100.000	21	5.500.000	21	4.100.000	21	4.100.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21	21		21	4.100.000	21	75.000.000	21	75.000.000	21	85.000.000	21	90.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100	7	204.451.974	7	237.934.311	7	298.077.659	7	345.000.000	7	390.000.000	7	437.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	46.855.615	2	61.319.652	2	75.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	97.203.760	3	97.203.760	3	97.203.760	3	120.000.000	3	130.000.000	3	140.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	8.675.499	2	8.675.499	2	8.675.499	2	10.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2.198.400	2	2.198.400	2	2.198.400	2	5.000.000	2	5.000.000	2	7.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	33.537.000	2	33.537.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	15.981.700	2	35.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100	2	1.364.230.100	2	1.372.058.820	2	1.410.000.000	2	1.450.000.000	2	1.510.000.000	2	1.570.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	119.572.100	12	127.400.820	12	140.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.244.658.000	12	1.244.658.000	12	1.270.000.000	12	1.300.000.000	12	1.350.000.000	12	1.400.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur	100	3	100.046.400	3	141.640.000	3	166.640.000	3	195.000.000	3	235.000.000	3	275.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	62.618.000	4	95.000.000	4	95.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4	140.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3	21.640.000	3	21.640.000	3	21.640.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	15.788.400	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	16.209.465	100	22.894.000	100	13.931.000	100	15.502.000	100	29.613.000	100	10.479.000
				1.304.363.000		1.311.047.000		1.349.931.000		1.399.502.000		1.469.613.000		1.514.479.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	1	16.209.465	1	22.894.000	1	13.931.000	1	15.502.000	1	29.613.000	1	10.479.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21	21	16.209.465	21	22.894.000	21	13.931.000	21	15.502.000	21	29.613.000	21	10.479.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	75.242.132	100	101.468.000	100	144.507.000	100	162.984.000	100	182.041.000	100	198.056.000
				5.117.237.000		5.143.463.800		5.296.007.000		5.490.484.000		5.765.541.000		5.941.556.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	2	75.242.132	2	101.468.000	2	84.999.881	2	87.500.138	2	89.999.943	2	92.500.101
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21	21	23.458.332	21	49.684.200	21	24.999.881	21	27.500.138	21	29.999.943	21	32.500.101

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21	21	51.783.800	21	51.783.800	21	60.000.000	21	60.000.000	21	60.000.000	21	60.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Berdayakan						2	59.507.119	2	75.483.862	2	92.041.057	2	105.555.899
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan						21	29.507.119	21	35.483.862	21	42.041.057	21	45.555.899
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						12	30.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaikan konflik di kecamatan yang di fasilitasi	100	100	65.542.000	100	65.878.000	100	67.831.000	100	70.322.000	100	73.845.000	100	76.099.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	2	62.171.000	2	62.507.200	2	64.460.200	2	66.951.200	2	70.474.200	2	72.728.200
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	58.800.000	12	59.136.400	12	61.089.400	12	63.580.400	12	67.103.400	12	69.357.400

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	12	3.371.000	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan Perda	100	1	3.371.000	1	3.370.800	1	3.370.800	1	3.370.800	1	3.370.800	1	3.370.800
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	3.371.000	2	3.370.800	2	3.370.800	2	3.370.800	2	3.370.800	2	3.370.800
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	189.889.000	100	190.862.000	100	196.522.000	100	203.739.000	100	213.946.000	100	220.477.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100	11	189.889.000	11	190.862.000	11	196.522.000	11	203.739.000	11	213.946.000	11	220.477.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	5	4.820.000	5	4.820.100	5	9.640.200	5	9.640.200	5	9.640.200	5	9.640.200
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	5	6.387.000	5	6.387.050	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	5		5		5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	5	5.520.000	5	5.520.100	5	5.520.100	5	5.520.100	5	5.520.100	5	5.520.100
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						5	4.820.100	5	4.820.100	5	4.820.100	5	4.820.100
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000

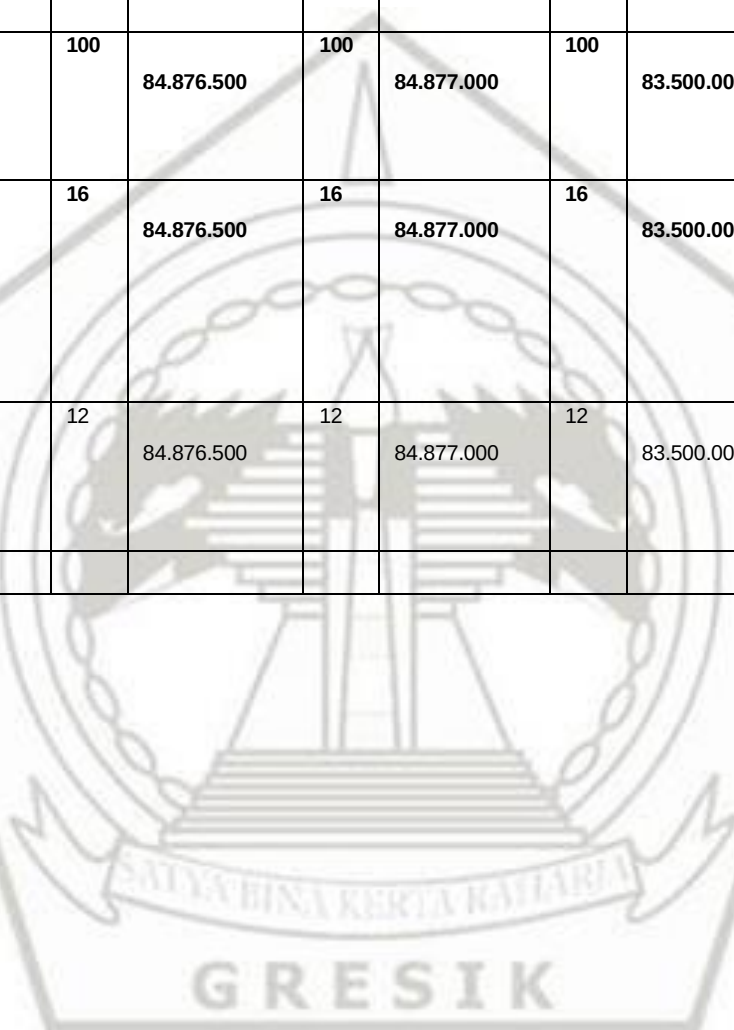
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	21	21	167.485.000	21	167.485.000	21	4.820.100	21	4.820.100	21	4.820.100	21	4.820.100
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	5	5.677.000	5	6.649.750	5	150.901.400	5	158.118.400	5	168.325.400	5	174.856.400
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	5		5		5	4.820.100	5	4.820.100	5	4.820.100	5	4.820.100
KELURAHAN BEDILAN				355.873.500		355.873.000		415.000.000		429.000.000		448.500.000		462.500.000
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	82.476.400	100	82.476.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	82.476.400	16	82.476.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	82.476.400	12	82.476.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	273.397.100	100	273.397.000	100	331.500.000	100	342.500.000	100	358.500.000	100	368.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	273.397.100	16	273.397.000	16	331.500.000	16	342.500.000	16	358.500.000	16	368.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	5.250.300	4	5.250.300	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	268.146.800	12	268.146.700	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000
KELURAHAN KARANGPOH				355.828.409		355.829.000		415.000.000		429.000.000		448.500.000		462.500.000
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	64.149.820	100	64.150.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	64.149.820	16	64.150.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	64.149.820	12	64.150.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibangun ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	291.678.589	100	291.679.000	100	331.500.000	100	342.500.000	100	358.500.000	100	368.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	291.678.589	16	291.679.000	16	331.500.000	16	342.500.000	16	358.500.000	16	368.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	28.150.256	4	28.150.256	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	263.528.333	12	263.528.744	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000

KELURAHAN KARANGTURI				408.317.500		408.318.000		428.500.000		442.500.000		462.000.000		476.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	84.876.500	100	84.877.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	84.876.500	16	84.877.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	84.876.500	12	84.877.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	323.441.000	100	323.441.000	100	345.000.000	100	356.000.000	100	372.000.000	100	382.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	323.441.000	16	323.441.000	16	345.000.000	16	356.000.000	16	372.000.000	16	382.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	13.041.000	4	13.041.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	310.400.000	12	310.400.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000

KELURAHAN KEBUNGSON				326.640.628		326.640.000		380.000.000		394.000.000		413.500.000		427.500.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	44.034.427	100	44.034.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	44.034.427	16	44.034.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	44.034.427	12	44.034.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	282.606.201	100	282.606.000	100	296.500.000	100	307.500.000	100	323.500.000	100	333.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	282.606.201	16	282.606.000	16	296.500.000	16	307.500.000	16	323.500.000	16	333.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	35.243.600	4	35.243.600	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	247.362.601	12	247.362.400	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000

KELURAHAN KEMUTERAN				326.634.642		326.635.000		380.000.000		394.000.000		413.500.000		427.500.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	49.182.694	100	49.183.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	49.182.694	16	49.183.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	49.182.694	12	49.183.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	277.451.948	100	277.452.000	100	296.500.000	100	307.500.000	100	323.500.000	100	333.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	277.451.948	16	277.452.000	16	296.500.000	16	307.500.000	16	323.500.000	16	333.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	5.372.400	4	5.372.400	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	272.079.548	12	272.079.600	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000

KELURAHAN KROMAN				355.665.600		355.666.000		415.000.000		429.000.000		448.500.000		462.500.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	50.260.600	100	50.261.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	50.260.600	16	50.261.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	50.260.600	12	50.261.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	305.405.000	100	305.405.000	100	331.500.000	100	342.500.000	100	358.500.000	100	368.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	305.405.000	16	305.405.000	16	331.500.000	16	342.500.000	16	358.500.000	16	368.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	6.105.000	4	6.105.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	299.300.000	12	299.300.000	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000

KELURAHAN LUMPUR				393.332.870		393.333.000		428.500.000		442.500.000		462.000.000		476.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	110.254.200	100	110.254.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	110.254.200	16	110.254.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	110.254.200	12	110.254.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	283.078.670	100	283.079.000	100	345.000.000	100	356.000.000	100	372.000.000	100	382.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	283.078.670	16	283.079.000	16	345.000.000	16	356.000.000	16	372.000.000	16	382.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	5.400.000	4	5.400.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	277.678.670	12	277.679.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000

KELURAHAN NGIPIK				453.329.227		453.329.000		365.000.000		379.000.000		398.500.000		412.500.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	64.926.808	100	64.927.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	64.926.808	16	64.927.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	64.926.808	12	64.927.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	388.402.419	100	388.402.000	100	281.500.000	100	292.500.000	100	308.500.000	100	318.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	388.402.419	16	388.402.000	16	281.500.000	16	292.500.000	16	308.500.000	16	318.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	237.094.474	4	237.094.055	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	151.307.945	12	151.307.945	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000

KELURAHAN PEKAUMAN				348.328.884		348.328.000		365.000.000		379.000.000		398.500.000		412.500.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	86.914.427	100	86.914.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	86.914.427	16	86.914.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	86.914.427	12	86.914.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	261.414.457	100	261.414.000	100	281.500.000	100	292.500.000	100	308.500.000	100	318.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	261.414.457	16	261.414.000	16	281.500.000	16	292.500.000	16	308.500.000	16	318.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	50.400.000	4	50.400.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	211.014.457	12	211.014.000	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000

KELURAHAN PEKELINGAN				393.328.300		393.328.000		365.000.000		379.000.000		398.500.000		412.500.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	63.929.400	100	63.929.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	63.929.400	16	63.929.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	63.929.400	12	63.929.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	329.398.900	100	329.399.000	100	281.500.000	100	292.500.000	100	308.500.000	100	318.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	329.398.900	16	329.399.000	16	281.500.000	16	292.500.000	16	308.500.000	16	318.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	95.062.500	4	95.062.500	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	234.336.400	12	234.336.500	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000

KELURAHAN SIDOKUMPUL				646.560.800		646.560.800		513.500.000		527.500.000		547.000.000		561.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	62.910.000	100	62.910.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	100	16	62.910.000	16	62.910.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	62.910.000	12	62.910.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	583.650.800	100	583.650.800	100	430.000.000	100	441.000.000	100	457.000.000	100	467.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	583.650.800	16	583.650.800	16	430.000.000	16	441.000.000	16	457.000.000	16	467.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	52.915.700	4	52.915.700	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	530.735.100	12	530.735.100	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000

KELURAHAN SUKODONO				361.329.227		361.329.000		365.000.000		379.000.000		398.500.000		412.500.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	76.711.252	100	76.711.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	76.711.252	16	76.711.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	76.711.252	12	76.711.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	284.617.975	100	284.618.000	100	281.500.000	100	292.500.000	100	308.500.000	100	318.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	284.617.975	16	284.618.000	16	281.500.000	16	292.500.000	16	308.500.000	16	318.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	93.003.425	4	93.003.450	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	191.614.550	12	191.614.550	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000

KELURAHAN SUKORAME				508.326.828		508.327.000		428.500.000		442.500.000		462.000.000		476.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	193.982.028	100	193.982.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	193.982.028	16	193.982.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	193.982.028	12	193.982.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	314.344.800	100	314.345.000	100	345.000.000	100	356.000.000	100	372.000.000	100	382.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	314.344.800	16	314.345.000	16	345.000.000	16	356.000.000	16	372.000.000	16	382.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	9.163.800	4	9.164.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	305.181.000	12	305.181.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000

KELURAHAN TLOGOPATUT				332.496.135		332.496.000		380.000.000		394.000.000		413.500.000		427.500.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	71.510.200	100	71.510.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	71.510.200	16	71.510.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	71.510.200	12	71.510.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	260.985.935	100	260.986.000	100	296.500.000	100	307.500.000	100	323.500.000	100	333.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	260.985.935	16	260.986.000	16	296.500.000	16	307.500.000	16	323.500.000	16	333.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	42.384.000	4	42.384.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	218.601.935	12	218.602.000	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000

KELURAHAN TLOGOPOJOK				408.327.660		408.328.000		428.500.000		442.500.000		462.000.000		476.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	115.684.860	100	115.685.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	115.684.860	16	115.685.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	115.684.860	12	115.685.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	292.642.800	100	292.643.000	100	345.000.000	100	356.000.000	100	372.000.000	100	382.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	292.642.800	16	292.643.000	16	345.000.000	16	356.000.000	16	372.000.000	16	382.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	53.000.000	4	53.000.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	239.642.800	12	239.643.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000

KELURAHAN TRATE				355.828.193		355.829.000		415.000.000		429.000.000		448.500.000		462.500.000
UNSUR KEWILAYAHAN										7				
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	66.349.919	100	66.350.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	100	16	66.349.919	16	66.350.000	16	83.500.000	16	86.500.000	16	90.000.000	16	94.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	12	66.349.919	12	66.350.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	~Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi ~Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Kesehatan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana oleh desa ~Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	100	100	289.478.274	100	289.479.000	100	331.500.000	100	342.500.000	100	358.500.000	100	368.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	100	16	289.478.274	16	289.479.000	16	331.500.000	16	342.500.000	16	358.500.000	16	368.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	4	32.444.900	4	32.444.900	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	257.033.374	12	257.034.100	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000
--------------------------------------	--	----	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.

SKPD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan G r e s i k Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Kedudukan Kecamatan	1.	Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
	2	Kecamatan dipimpin oleh Camat
	3	Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Tugas Kecamatan	Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :	
Penjelasan	1.	Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud adalah :
	a	mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
	b	mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
	c	mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
	d	mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

	e	mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
	f	membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;
	g	melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
	h	Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
	i	Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana
	j	Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
	k	Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
	l	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
	2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi	
	a. perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi; d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. penetapan; h. penyelenggaraan; dan i. kewenangan lain yang dilimpahkan	
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.		

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan seksi sebagai berikut :

2.1.1 Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas; Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan. Kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.2 Subbagian keuangan ,program dan pelaporan, mempunyai tugas;

Seksi Keuangan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang Keuangan,program dan Pelaporan antara lain :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan.
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola keuangan Kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Desa/Kelurahan;

- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau pejabat sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- g. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- i. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
- j. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- l. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- n. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- p. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- q. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- r. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5 Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.

Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6 Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu ang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesai dengan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan Program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.8 Kelurahan

- 1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;
- 3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;

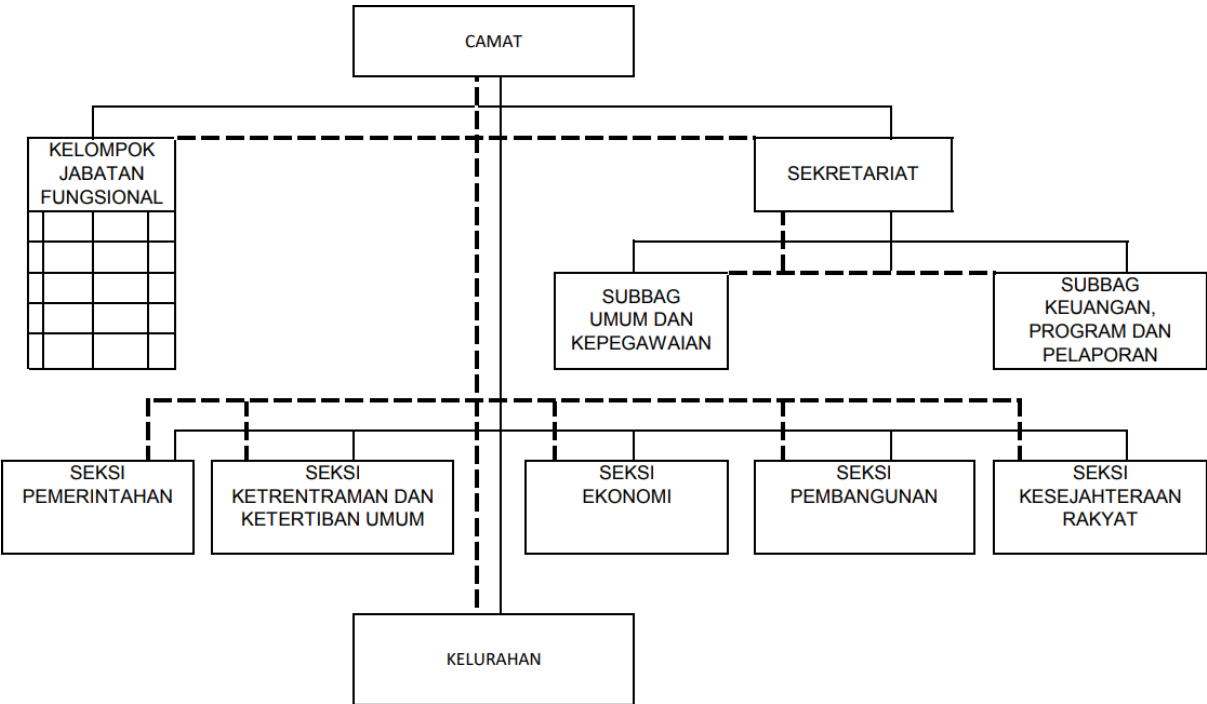
- 4) Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- 5) Ketentuan pelimpahan urusan Pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di Kecamatan;

2.1.9 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Secara lebih jelas, struktur organisasi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2.1.10 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gresik

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Gresik sebagai berikut :

- 1. Pelayanan administrasi perkantoran;
- 2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
- 3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
- 4. Fasilitasi pengurusan IMB;
- 5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
- 6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 7. Fasilitasi pemberian bantuan Alokasi Dana Desa (ADD);
- 8. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Sasaran dan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sasaran : Meningkatkan Keselarasan Pembangunan Prioritas Pendidikan di Tingkat Desa Indikator : Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
2	Sasaran : Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan diTingkat Desa Indikator : Rasio pendanaan kesehatan di perdesaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
3	Sasaran : Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan. Indikatr : Rasio pendanaan perlindungan anak di perdesaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
4	Sasaran : Menigkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Pemberdayaan Perempuan di tingkat desa/Kelurahan Indikator : Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan dikawasan perdesaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1

5	Sasaran: Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Infrastruktur Desa. Indikator : Rasio belanja infrastruktur desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
6	Sasaran : Meningkatkan keselarasan Pembangunan Prioritas Penanggulangan Bencana di tingkat desa Indikator : Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
7	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Indikator : Indeks Ke[uasan masyarakat	%	90	91	92	93	94



2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Ada beberapa permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Gresik yang bisa menjadi faktor penghambat untuk menuju Visi dan Misi yang diinginkan. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Gresik secara menyeluruh selama 5 (lima) tahun yang lalu serta mencermati permasalahan dan isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik, maka beberapa permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Gresik 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

- a. Belum Optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.
- c. Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang;
- d. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan Pendidikan, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan infrastruktur
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- d. Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Beberapa permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Gresik di tuangkan dalam tabel berikut :

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	Kekuatan (Strengths) : a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. SDM secara kuantitatif sangat memadai c. Tersedianya sarana- prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat. d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi pembangunan. f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.	Kelemahan (Weaknesses) : a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif. b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar dinas instansi terkait. e. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan. g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.
	Peluang (Opportunities) : a. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan. b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik c. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat; d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pembangunan;	Strategi SO a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur Strategi WO a. Meningkatkan penyelenggaraanpembinaa n dan fasilitasi Pemerintah Desa b. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah c. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan

e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Perkebunan, Perikanan dan Industri f. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Pantura merupakan peluang bagi perekonomian/perdagangan;		
<u>Ancaman (Threats) :</u> a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi). b. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang terkadang dianggap kurang profesional. c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. e. Kebijakan yang dihasilkan bisa berupa kepentingan pada kelompok tertentu. f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa adanya komplain dari masyarakat. g. Banyaknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terkoreksi. h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran	<u>Strategi ST</u> a. Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan c. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	<u>Strategi WT</u> a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah d. Melaksanakan pemebinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

BAB III

TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Gresik 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Gresik



TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TH. 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar Pendidikan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
2. Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan		Meningkatnya keselarasan pembanguna prioritas daerah ditingkat desa	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas kesehatan ditingkat desa/kelurahan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
3. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
4. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan ditingkat desa/kelurahan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	

5. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
6. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana di desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	89%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	



3.1.2. Sasaran Renstra Kecamatan Gresik

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria SMART*. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat kelurahan/desa

3.1.3 Indikator Sasaran :

3.1.3.1 Nilai IKM Kecamatan Gresik

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya

pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur **keberhasilan** pencapaian sasaran

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Indikator pelayanan Kecamatan Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas layanan dasar dan infrastruktur dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	90%	91%	92%	93%	94%	95%

3.1.3.2 Persentase kelurahan/desa yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan Kelurahan/desa Tujuan dari dilaksanakannya program prioritas daerah sesuai kewenangan kelurahan/desa di Kecamatan Gresik adalah ;

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yakni dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelurahan/desa di Kecamatan Gresik melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan yakni dengan mengoptimalkan sumber daya kelurahan/desa termasuk sumber daya manusia, keuangan dan fisik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah kelurahan/desa dalam mengelola pembangunan kelurahan/desa
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kelurahan/desa termasuk pelayanan Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur kelurahan/desa dan pelayanan lain terkait administrasi kependudukan.

Tabel 3.1.2 Indikator prosentase kelurahan/desa yang melaksanakan kewenangan kelurahan/desa

		INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
TUJUAN	SASARAN	SASARAN	1	2	3	4	5	6
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas layanan dasar dan infrastruktur dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat kelurahan/desa	- Rasio pendanaan Pendidikan	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pendanaan kesehatan	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pendanaan perlindungan anak	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio belanja infrastruktur	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pembiayaan penanggulangan bencana	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Indeks kepuasan masyarakat	90	91	92	93	94	95

3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029

Strategi Kecamatan Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD adalah dengan strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang (*Opportunities, Treaths*). Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya- upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029, Kebijakan Kecamatan Gresik tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Aset dan Kesejahteraan Sosial, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan/desa. Keselarasan mulai dari Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Lampiran Tabel Berikut

Fokus Strategis / Tujuan Renstra PD	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dikecamatan seperti meningkatkanefektivitas dan inovasi pelayanan	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelayanan publik dengan meningkatkan kapasita SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang responsi,transparan,dan akuntabel	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya	Meningkatkan kapasitas SDM untuk melaksanakan pelayanan publik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahanserta dunia usaha.	2. Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahanserta dunia usaha.	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha dengan meningkatkan kapasita SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Melaksanakan kegiatan penyelarasan pembangunan priotitas daerah ditingkat desa/kelurahan serta duania usaha dengan transparan dan akuntabel	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha	meningkatkan kapasitas SDM untuk penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Gresik

3.3 Arah kebijakan Kecamatan Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah dan kebijakan Kecamatan Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra bertujuan agar dapat membantu kecamatan Gresik dalam melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

3.1.1 Arah Pembangunan

- a. Pembangunan Infrastruktur
Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelurahan/desa.
- b. Pengembangan ekonomi
Dengan mengembangkan sector ekonomi kelurahan/desa yang potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat kelurahan/desa.
- d. Peningkatan kualitas kesehatan
Dengan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu balita, posyandu lansia dan pembinaan kader-kader kesehatan

3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan

- a. Kebijakan pembangunan partisipatif
Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan adanya Musrenbang tiap tahun.
- b. Kebijakan pembangunan berkelanjutan
Dengan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan tidak merusak lingkungan
- c. Kebijakan pembangunan inklusif
Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan tidak ada kelompok yang tertinggal.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK												
- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27		
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84		
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370		
			Rasio Government Expenditure (%)	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45		
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17		
			Indeks Perlindungan Anak (%)	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50		
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51		
			Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	85	90	91	92	93	94	95	
			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

Tabel 3.3. Tehnik merumuskan tujuan dan sasaran



3.4. Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD

3.5 Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tabel 3.5 Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD

BAB IV
PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Gresik selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Gresik. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gresik menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

4.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program Kecamatan Gresik tahun 2025-2029 sebagai berikut:

4.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Kecamatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

4.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

4.1.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Kelurahan/Desa untuk mengelola sumber daya Kelurahan/Desa, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Kelurahan/Desa serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan Kelurahan/Desa.

4.1.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

4.1.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan/Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan transparansi Kelurahan/Desa

dalam mengelola keuangan, sumber daya dan pembangunan Kelurahan/Desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kelurahan/Desa melalui pelayanan public yang berkualitas.

4.2. Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gresik tahun 2025-2029 sebagai berikut:

4.2.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.2.2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah

4.2.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.2.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.2.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.2.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

4.2.6 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

4.2.6 *koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan*

4.2.7 koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/Desa

4.2.8 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan

4.2.9 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

4.2.10 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.2.11 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah

4.2.12 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan/Desa

4.3. Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci tersusun dalam Rencana Sub Kegiatan. Sub Kegiatan berisi penjabaran rencana Program dan Kegiatan secara rinci termasuk pagu indikatifnya.

Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gresik tahun 2025-2029 sebagai berikut :merupakan uraian pelaksanaan kegiatan secara terperinci dan terukur:

4.3.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4.3.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

4.3.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4.3.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- 4.3.5. Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
- 4.3.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 4.3.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4.3.8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4.3.9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4.3.10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 4.3.11. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 4.3.12. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 4.3.13. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4.3.14. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4.3.15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- 4.3.16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.3.17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.3.18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.3.19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4.3.20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.3.21. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 4.3.22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 4.3.23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4.3.24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 4.3.25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4.3.26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4.3.27. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4.3.28. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 4.3.29. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4.3.30. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4.3.31. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- 4.3.32. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 4.3.33. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- 4.3.34. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4.3.35. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4.3.36. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4.3.37. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4.3.38. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 4.3.39. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 4.3.40. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 4.3.41. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4.3.42. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 4.3.43. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 4.3.44. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.3.38. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 4.3.45. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 4.3.46. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 4.3.47. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.3.48. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada .

Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Gresik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Gresik berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang -kurangnya menggunakan indikator keluaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Gresik disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Gresik adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan/Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Gresik, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat Kelurahan/Desa terutama pelaku usaha ekonomi kerakyatan dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2025 - 2029.

3. Pendanaan Indikatif

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gresik Tahun 2025 – 2029 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

4. Pernyataan Eksplisit

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034

Rincian secara koprehensif tersaji dalam tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama PD

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci

**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK							
- Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		

lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit							
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gresik		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

				Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber daya Aparatur di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Berdayakan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	

						Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
					Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gresik		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber daya Aparatur di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Berdayakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
--	--	--	--	--	---	--	--

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				23.900.190.000		24.609.014.000		25.512.691.000		26.790.803.000		27.608.693.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.188.939.000		17.698.723.000		18.348.644.000		19.267.858.000		19.856.082.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gresik	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	17.188.939.000	100	17.698.723.000	100	18.348.644.000	100	19.267.858.000	100	19.856.082.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.000.000		18.300.000		24.200.000		18.300.000		18.300.000		
Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	11.000.000	2	18.300.000	2	24.200.000	2	18.300.000	2	18.300.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.300.000		2.300.000		3.200.000		2.300.000		2.300.000		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.300.000	2	2.300.000	2	3.200.000	2	2.300.000	2	2.300.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.200.000		3.200.000		4.100.000		3.200.000		3.200.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.200.000	2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		3.200.000		4.100.000		3.200.000		3.200.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			0	2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.200.000		4.100.000		5.500.000		4.100.000		4.100.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.200.000	2	4.100.000	2	5.500.000	2	4.100.000	2	4.100.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.300.000		2.300.000		3.200.000		2.300.000		2.300.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2.300.000	2	2.300.000	2	3.200.000	2	2.300.000	2	2.300.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		3.200.000		4.100.000		3.200.000		3.200.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			0	2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.418.105.869		15.713.405.341		16.239.844.000		17.012.258.000		17.447.982.000		
Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	130	130	15.418.105.869	130	15.713.405.341	130	16.239.844.000	130	17.012.258.000	130	17.447.982.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				2		2		2		2			

	Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.414.005.869		15.706.105.341		16.230.244.000		17.004.958.000		17.440.682.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	130	130	15.414.005.869	130	15.706.105.341	130	16.230.244.000	130	17.004.958.000	130	17.440.682.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.100.000		4.100.000		5.500.000		4.100.000		4.100.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	4.100.000	2	4.100.000	2	5.500.000	2	4.100.000	2	4.100.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		3.200.000		4.100.000		3.200.000		3.200.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)			0	2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.200.000		92.300.000		94.600.000		102.300.000		107.300.000		
Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber daya Aparatur di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			8.200.000	2	92.300.000	2	94.600.000	2	102.300.000	2	107.300.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				21		21		21		21			
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		3.200.000		4.100.000		3.200.000		3.200.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			0	2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000		

7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			0	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000		
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4.100.000		4.100.000		5.500.000		4.100.000		4.100.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	21	21	4.100.000	21	4.100.000	21	5.500.000	21	4.100.000	21	4.100.000		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4.100.000		75.000.000		75.000.000		85.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	21	21	4.100.000	21	75.000.000	21	75.000.000	21	85.000.000	21	90.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				237.934.311		298.077.659		345.000.000		390.000.000		437.500.000		
Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	237.934.311	2	298.077.659	2	345.000.000	2	390.000.000	2	437.500.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				2		2		2		2			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang			0	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000		

	Disediakan (Paket)													
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				61.319.652		75.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	61.319.652	2	75.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				97.203.760		97.203.760		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	97.203.760	3	97.203.760	3	120.000.000	3	130.000.000	3	140.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.675.499		8.675.499		10.000.000		15.000.000		20.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	8.675.499	2	8.675.499	2	10.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.198.400		2.198.400		5.000.000		5.000.000		7.500.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	2.198.400	2	2.198.400	2	5.000.000	2	5.000.000	2	7.500.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33.537.000		45.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	33.537.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				35.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2	35.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.372.058.820		1.410.000.000		1.450.000.000		1.510.000.000		1.570.000.000		
Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.372.058.820	12	1.410.000.000	12	1.450.000.000	12	1.510.000.000	12	1.570.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.400.820		140.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	127.400.820	12	140.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.244.658.000		1.270.000.000		1.300.000.000		1.350.000.000		1.400.000.000		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.244.658.000	12	1.270.000.000	12	1.300.000.000	12	1.350.000.000	12	1.400.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.640.000		166.640.000		195.000.000		235.000.000		275.000.000		
Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	141.640.000	3	166.640.000	3	195.000.000	3	235.000.000	3	275.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.000.000		95.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	95.000.000	4	95.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4	140.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.640.000		21.640.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	21.640.000	3	21.640.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.311.047.000		1.349.931.000		1.399.502.000		1.469.613.000		1.514.479.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	22.894.000	100	13.931.000	100	15.502.000	100	29.613.000	100	10.479.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				22.894.000		13.931.000		15.502.000		29.613.000		10.479.000		

Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	21	21	22.894.000	21	13.931.000	21	15.502.000	21	29.613.000	21	10.479.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				22.894.000		13.931.000		15.502.000		29.613.000		10.479.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	21	21	22.894.000	21	13.931.000	21	15.502.000	21	29.613.000	21	10.479.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Bedilan	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	82.476.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.000 1 - KELURAHAN BEDILAN	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				82.476.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	82.476.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				82.476.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	82.476.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan karangpoh	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	64.150.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.000 2 - KELURAHAN KARANGPOH	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				64.150.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	64.150.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				64.150.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	64.150.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		

Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Karangturi	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	84.877.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.000 3 - KELURAHAN KARANGTURI	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				84.877.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	84.877.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				84.877.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	84.877.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Kebungson	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	44.034.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.000 4 - KELURAHAN KEBUNGSON	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				44.034.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	44.034.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				44.034.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	44.034.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Kemuteran	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	49.183.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.000 5 - KELURAHAN KEMUTERAN	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				49.183.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	49.183.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		

7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				49.183.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	49.183.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Kroman	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	50.261.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.000 6 - KELURAHAN KROMAN	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				50.261.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	50.261.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				50.261.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	50.261.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Lumpur	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	110.254.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.000 7 - KELURAHAN LUMPUR	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				110.254.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	110.254.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				110.254.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	110.254.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Ngipik	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	64.927.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.000 8 - KELURAHAN NGIPIK	

7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				64.927.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	64.927.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				64.927.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	64.927.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Pekauman	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	86.914.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0009 - KELURAHAN PEKAUMAN	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				86.914.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	86.914.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				86.914.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	86.914.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Pekelingan	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	63.929.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0010 - KELURAHAN PEKELINGAN	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				63.929.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	63.929.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				63.929.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	63.929.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030							

			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Sidokumpul	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	62.910.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.001 1 - KELURAHAN SIDOKUMPUK	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				62.910.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	62.910.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				62.910.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	62.910.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Sukodono	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	76.711.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.001 2 - KELURAHAN SUKODONO	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				76.711.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	76.711.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				76.711.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	76.711.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Sukorame	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	193.982.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.001 3 - KELURAHAN SUKORAME	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				193.982.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	193.982.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				193.982.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	193.982.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Tlogopatut	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	71.510.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.001 4 - KELURAHAN TLOGOPATUT	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				71.510.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	71.510.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				71.510.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	71.510.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Tlogopojok	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	115.685.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.001 5 - KELURAHAN TLOGOPOJOK	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				115.685.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	115.685.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				115.685.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	115.685.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - kelurahan Trate	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	66.350.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.001 6 - KELURAHAN TRATE	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				66.350.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	66.350.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				66.350.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	66.350.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				5.143.464.000		5.296.007.000		5.490.484.000		5.765.541.000		5.941.556.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100	101.468.000	100	144.507.000	100	162.984.000	100	182.041.000	100	198.056.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				101.468.000		84.999.881		87.500.138		89.999.943		92.500.101		
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	21	21	101.468.000	21	84.999.881	21	87.500.138	21	89.999.943	21	92.500.101		

	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	21	21		21		21		21		21			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				49.684.200		24.999.881		27.500.138		29.999.943		32.500.101		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	21	21	49.684.200	21	24.999.881	21	27.500.138	21	29.999.943	21	32.500.101		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				51.783.800		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	21	21	51.783.800	21	60.000.000	21	60.000.000	21	60.000.000	21	60.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				0		59.507.119		75.483.862		92.041.057		105.555.899		
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Berdayakan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)			0	12	59.507.119	12	75.483.862	12	92.041.057	12	105.555.899		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)				21		21		21		21			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		29.507.119		35.483.862		42.041.057		45.555.899		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)			0	21	29.507.119	21	35.483.862	21	42.041.057	21	45.555.899		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)			0	12	30.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Bedilan	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	273.397.000	100	331.500.000	100	342.500.000	100	358.500.000	100	368.500.000	7.01.0.00.0.00.01.000 1- KELURAHAN BEDILAN	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			

	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				273.397.000		331.500.000		342.500.000		358.500.000		368.500.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	273.397.000	4	331.500.000	4	342.500.000	4	358.500.000	4	368.500.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				5.250.300		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	5.250.300	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				268.146.700		311.500.000		311.500.000		311.500.000		311.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	268.146.700	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Karangpoh	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100	291.679.000	100	331.500.000	100	342.500.000	100	358.500.000	100	368.500.000	7.01.0.00.0.00.01.000 2 - KELURAHAN KARANGPOH	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan	100	100		100		100		100		100			

	Anak (%)													
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				291.679.000		331.500.000		342.500.000		358.500.000		368.500.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	291.679.000	12	331.500.000	12	342.500.000	12	358.500.000	12	368.500.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				28.150.256		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	28.150.256	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				263.528.744		311.500.000		311.500.000		311.500.000		311.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	263.528.744	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Kebungson	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	282.606.000	100	296.500.000	100	307.500.000	100	323.500.000	100	333.500.000	7.01.0.00.0.00.01.000 4 - KELURAHAN KEBUNGSON	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				282.606.000		296.500.000		307.500.000		323.500.000		333.500.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	282.606.000	12	296.500.000	12	307.500.000	12	323.500.000	12	333.500.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				35.243.600		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	35.243.600	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				247.362.400		276.500.000		276.500.000		276.500.000		276.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	247.362.400	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Kemuteran	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100	277.452.000	100	296.500.000	100	307.500.000	100	323.500.000	100	333.500.000	7.01.0.00.0.00.01.000 5 - KELURAHAN KEMUTERAN	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			

	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				277.452.000		296.500.000		307.500.000		323.500.000		333.500.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	277.452.000	4	296.500.000	4	307.500.000	4	323.500.000	4	333.500.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				5.372.400		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	5.372.400	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				272.079.600		276.500.000		276.500.000		276.500.000		276.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	272.079.600	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Kroman	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100	305.405.000	100	331.500.000	100	342.500.000	100	358.500.000	100	368.500.000	7.01.0.00.0.00.01.000 6 - KELURAHAN KROMAN	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			

	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				305.405.000		331.500.000		342.500.000		358.500.000		368.500.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	305.405.000	4	331.500.000	4	342.500.000	4	358.500.000	4	368.500.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				6.105.000		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	6.105.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				299.300.000		311.500.000		311.500.000		311.500.000		311.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	299.300.000	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Lumpur	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	283.079.000	100	345.000.000	100	356.000.000	100	372.000.000	100	382.000.000	7.01.0.00.0.00.01.000 7 - KELURAHAN LUMPUR	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana	100	100		100		100		100		100			

	Oleh Desa (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				283.079.000		345.000.000		356.000.000		372.000.000		382.000.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	283.079.000	12	345.000.000	12	356.000.000	12	372.000.000	12	382.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				5.400.000		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	5.400.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				277.679.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	277.679.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Ngipik	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	388.402.000	100	281.500.000	100	292.500.000	100	308.500.000	100	318.500.000	7.01.0.00.0.00.01.000 8 - KELURAHAN NGIPIK	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			

	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				388.402.000		281.500.000		292.500.000		308.500.000		318.500.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	388.402.000	4	281.500.000	4	292.500.000	4	308.500.000	4	318.500.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				237.094.055		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	237.094.055	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				151.307.945		261.500.000		261.500.000		261.500.000		261.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	151.307.945	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Pekauman	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100	261.414.000	100	281.500.000	100	292.500.000	100	308.500.000	100	318.500.000	7.01.0.00.0.00.01.000 9 - KELURAHAN PEKAUMAN	
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				261.414.000		281.500.000		292.500.000		308.500.000		318.500.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	261.414.000	4	281.500.000	4	292.500.000	4	308.500.000	4	318.500.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				50.400.000		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	50.400.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				211.014.000		261.500.000		261.500.000		261.500.000		261.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	211.014.000	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Pekelingan	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100	329.399.000	100	281.500.000	100	292.500.000	100	308.500.000	100	318.500.000	7.01.0.00.0.00.01.001 0 - KELURAHAN PEKELINGAN	
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				329.399.000		281.500.000		292.500.000		308.500.000		318.500.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	329.399.000	4	281.500.000	4	292.500.000	4	308.500.000	4	318.500.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				95.062.500		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	95.062.500	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				234.336.500		261.500.000		261.500.000		261.500.000		261.500.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	234.336.500	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Sidokumpul	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100	583.651.000	100	430.000.000	100	441.000.000	100	457.000.000	100	467.000.000	7.01.0.00.0.00.01.001 1 - KELURAHAN SIDOKUMPUL	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				583.651.000		430.000.000		441.000.000		457.000.000		467.000.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	583.651.000	4	430.000.000	4	441.000.000	4	457.000.000	4	467.000.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				52.915.900		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	52.915.900	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		

7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				530.735.100		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000				
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	530.735.100	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000				
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Sukodono	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (%)	100	100	284.618.000	100	281.500.000	100	292.500.000	100	308.500.000	100	318.500.000	7.01.0.00.0.00.01.001 2 - KELURAHAN SUKODONO			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100					
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100					
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				284.618.000		281.500.000		292.500.000		308.500.000		318.500.000				
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	284.618.000	4	281.500.000	4	292.500.000	4	308.500.000	4	318.500.000				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12					
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				93.003.450		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000				
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	93.003.450	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000				
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				191.614.550		261.500.000		261.500.000		261.500.000		261.500.000				

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	191.614.550	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Sukorame	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100	314.345.000	100	345.000.000	100	356.000.000	100	372.000.000	100	382.000.000	7.01.0.00.0.00.01.001 3 - KELURAHAN SUKORAME	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				314.345.000		345.000.000		356.000.000		372.000.000		382.000.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	314.345.000	4	345.000.000	4	356.000.000	4	372.000.000	4	382.000.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				9.164.000		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	9.164.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				305.181.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	305.181.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000		

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Tlogopatut	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100	260.986.000	100	296.500.000	100	307.500.000	100	323.500.000	100	333.500.000	7.01.0.00.0.00.01.001 4 - KELURAHAN TLOGOPATUT	
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				260.986.000		296.500.000		307.500.000		323.500.000		333.500.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	260.986.000	4	296.500.000	4	307.500.000	4	323.500.000	4	333.500.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				42.384.000		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	42.384.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				218.602.000		276.500.000		276.500.000		276.500.000		276.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	218.602.000	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000		

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Tlogopojoyok	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100	292.643.000	100	345.000.000	100	356.000.000	100	372.000.000	100	382.000.000	7.01.0.00.0.00.01.001 5 - KELURAHAN TLOGOPOJOK	
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				292.643.000		345.000.000		356.000.000		372.000.000		382.000.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	292.643.000	4	345.000.000	4	356.000.000	4	372.000.000	4	382.000.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				53.000.000		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	53.000.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				239.643.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	239.643.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Trate	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100	289.479.000	100	331.500.000	100	342.500.000	100	358.500.000	100	368.500.000	7.01.0.00.0.00.01.001 6 - KELURAHAN TRATE	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				289.479.000		331.500.000		342.500.000		358.500.000		368.500.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	289.479.000	12	331.500.000	12	342.500.000	12	358.500.000	12	368.500.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				32.444.900		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	32.444.900	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				257.034.100		311.500.000		311.500.000		311.500.000		311.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	257.034.100	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Karangturi	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100	323.441.000	100	345.000.000	100	356.000.000	100	372.000.000	100	382.000.000	7.01.0.00.0.00.01.000 3 - KELURAHAN KARANGTURI	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			

	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				323.441.000		345.000.000		356.000.000		372.000.000		382.000.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	323.441.000	12	345.000.000	12	356.000.000	12	372.000.000	12	382.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				13.041.000		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	13.041.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				310.400.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	310.400.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				65.878.000		67.831.000		70.322.000		73.845.000		76.099.000		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Gresik	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	65.878.000	100	67.831.000	100	70.322.000	100	73.845.000	100	76.099.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				62.507.200		64.460.200		66.951.200		70.474.200		72.728.200		

Jumlah Pelaksanaan Ketentraman dan Keteritiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	62.507.200	12	64.460.200	12	66.951.200	12	70.474.200	12	72.728.200		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12	2		2		2		2		2			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				59.136.400		61.089.400		63.580.400		67.103.400		69.357.400		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	59.136.400	12	61.089.400	12	63.580.400	12	67.103.400	12	69.357.400		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3.370.800		3.370.800		3.370.800		3.370.800		3.370.800		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12	2	3.370.800	2	3.370.800	2	3.370.800	2	3.370.800	2	3.370.800		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3.370.800		3.370.800		3.370.800		3.370.800		3.370.800		
Jumlah Koordinasi Penegakan Perda	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3.370.800		3.370.800		3.370.800		3.370.800		3.370.800		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800		

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				190.862.000		196.522.000		203.739.000		213.946.000		220.477.000		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Gresik	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100	190.862.000	100	196.522.000	100	203.739.000	100	213.946.000	100	220.477.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK	
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				190.862.000		196.522.000		203.739.000		213.946.000		220.477.000		
Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)			190.862.000	5	196.522.000	5	203.739.000	5	213.946.000	5	220.477.000		
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)				5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)				5		5		5		5			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)				5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	21	21		21		21		21		21			

	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)				5		5		5		5			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)			0	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)			0	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4.820.100		9.640.200		9.640.200		9.640.200		9.640.200		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5	5	4.820.100	5	9.640.200	5	9.640.200	5	9.640.200	5	9.640.200		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				6.387.050		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	5	5	6.387.050	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			0	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				5.520.100		5.520.100		5.520.100		5.520.100		5.520.100		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	5	5.520.100	5	5.520.100	5	5.520.100	5	5.520.100	5	5.520.100		

	(Dokumen)													
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				0		4.820.100		4.820.100		4.820.100		4.820.100		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)			0	5	4.820.100	5	4.820.100	5	4.820.100	5	4.820.100		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		
Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)			0	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000		
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				167.485.000		4.820.100		4.820.100		4.820.100		4.820.100		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	21	21	167.485.000	21	4.820.100	21	4.820.100	21	4.820.100	21	4.820.100		
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				6.649.750		150.901.400		158.118.400		168.325.400		174.856.400		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	5	5	6.649.750	5	150.901.400	5	158.118.400	5	168.325.400	5	174.856.400		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				0		4.820.100		4.820.100		4.820.100		4.820.100		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)			0	5	4.820.100	5	4.820.100	5	4.820.100	5	4.820.100		

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Gresik

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD Pemerintah Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK									
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
4.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
5.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
7.	Indeks Perlindungan Anak	%	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
8.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi / arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil kepuasan dalam mengalokasikan anggaran dan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai SKPD Kecamatan Gresik berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026 – 2029 yang berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih, Kecamatan Gresik adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA / RKA dan sebagai pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Gresik dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 disusun dengan harapan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2026 – 2029 ini masih perlu penyempurnaan untuk itu mohon adanya saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan penyusunan Renstra SKPD pada masa – masa yang akan datang.

Demikian Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2026 – 2029 ini bisa direalisasikan dengan baik demi mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan demi mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Gresik.

Gresik, September 2025
CAMAT GRESIK

JALESVIE TRIYATMOKO, S.S
Pembina Tingkat I
NIP. 198012172006041012